

LAPORAN

**KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN
2020**



**DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI PESISIR SELATAN**

MELALUI

**CAMAT RANAH AMPEK HULU
TAPAN**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wv.

Puji syukur marilah kita ucapkan ke hadirat allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami telah dapat menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kubu tangan tahun 2020, salawat beriring salam kita sampaikan kepada nabi muhammad saw yang telah berhasil merubah akhlak manusia dari akhlak jahilyah kepada akhlak islamiyah yang kita harapkan sampai akhir zaman amiiin.

Berdasarkan pasal 13 ayat 2 peraturan daerah kabupaten pesisir selatan no. 08 tahun 2007 tentang peraturan nagari, bahwa wali nagari berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (lkpj) kepada bamus nagari dan memberikan laporan penyelenggraan pemerintah nagari (lppn) kepada bupati sebagai wujud akuntabilitas public (public accountability) pemerintah nagari mengenai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berikut laporannya , program laporan ini selanjutnya dievaluasi dan bagaimana sinergilitasnya dengan visi dan misi nagari kubu tangan.

bapak camat dan ketua bamus beserta anggota bamus nagari kubu tangan yang terhormat.

Pada tanggal 1 Januari tahun 2017, dilantiknya Syafriadi Ahmad sebagai wali nagari defenitif nagari kubu tangan bertempat di kantor bupati kabupaten pesisir selatan oleh bapak bupati kabupaten peisisir selatan.

Selanjutnya kepada bamus nagari kubu tangan kami laporkan bahwa selama tahun 2020 program dan kegiatan berdasarkan indicator pencapaian kinerja sebahagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan . Namun sebagai manusia biasa kami menyadari masih ada program dan kegiatan yang belum terlaksana yang memuaskan seluruh harapan masyarakat nagari kubu tangan maka melalui laporan ini kami mohon maaf.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

BAB I: PENDAHULUAN

A.DASAR HUKUM / LATAR BELAKANG.....

B.GAMBARAN HUKUM PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN

1.Kondisi Geografis : Batas ADM Pemerintah Nagari, Luas

Wilayah, Topografis dan hal-hal lain yang dianggap
Perlu.

2.Gambaran Umum kondisi Demografis Nagari: Jumlah
Penduduk, Komposisi Kependudukan menurut jenis
kelamin, Usia, jenis Pekerjaan dan Pendidikan.

3. Kondisi Ekonomi

a.Potensi Lingkungan

b.Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM PEMERINTAH NAGARI

A. Visi dan Misi

B.Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Nagari (Sesuai dengan
RPJMPemerintah Nagari)

C. Prioritas program dan kegiatan

BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2020

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari Tahun 2020

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Target dan realisasi pendapatan (Pendapatan Asli Nagari , Bantuan Pemerintahan
kabupaten /ADPN) ,Pemerintah propinsi, Pemingintah Pusat, Dan pendapatan
Nagari Lainnya yang sah.

3. Permasalahan dan penyelesaian.

B. PENGELOLAAN Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2020

1. Target dan Realisasi Belanja (Pendapatan Asli Nagari , Bantuan Pemerintah
Kabupaten./ADPN), Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, Dan Pendapatan
Nagari lainnya yang sah

2. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH NAGARI

A.Urusan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari (Program dan
Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahn dan
Penyelesaian) .

B.Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten (Program
dan kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan penyelesaian).

BAB V : PENYELEGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima (dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten)

1. Dasar Hukum,

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

3. Satuan Pelaksana Kegiatan .

4. Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan yang diterima

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerja sama Antar Desa/ Nagari (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi, Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian)

B. Kerja sama dengan Pihak Ketiga (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi, Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian)

C. Batas Desa / Nagari (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi, Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya

2. Status Bencana

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

1. Gangguan yang terjadi

2. Satuan Pelaksana Kegiatan

3. Data Perangkat Pemerintah Nagari

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

5. Penanggulangan dan kendalanya

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

BAB VII : PENUTUP.

LAMPIRAN : RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN TA. 2019

BAB I

A.DASAR HUKUM / LATAR BELAKANG

Dasar hukum dalam pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, termasuk Nagari Kubu Tapan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 18 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Produk hukum ini menuntut terjadinya perubahan paradigma dalam pengelolaan Pemerintah Nagari, baik dalam kepemimpinan maupun Pengawasan.

Berkaitan dengan pemerintah Nagari yang diberi Otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan mengurus urusan Rumah Tangganya, Pemerintah Nagari dituntut mensinergiskan perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Nagari berazaskan Demokrasi, pemerataan dan berkeadilan yang secara bertahap di harapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ditekankan kepada peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan memperhatikan aspek hubungan antar lembaga - Lembaga Nagari dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas public (Public Accountability) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 tahun 2007, Pemerintahan Nagari telah diberikan Kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan Otonomi Nagari dalam lingkup system penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam Konteks kepemimpinan dan system pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas, selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran, Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BAMUS Nagari.

Selubungan Nagari Kubu Tapan adalah Nagari pemekaran yang disampaikan kepada Bamus Nagari Kubu Tapan dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/289/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 untuk Nagari TaratakTempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari KubuTapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Nagari ini untuk menjelaskan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Kubu Tapan kepada Masyarakat melalui BAMUS Nagari Kubu Tapan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Secara bertahap di harapkan ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari.

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Kondisi Geografis Nagari.

Nagari Kubu Tapan merupakan terletak di Ibu Kota Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan jarak 143 km dari Paman dan 221 km dari Padang. Luas Nagari Kubu Tapan adalah 3.197,80 Ha dengan jumlah 2 Kampung. Adapun Batas Nagari Kubu Tapan adalah :

- Sebelah Barat Berbatas Dengan Nagari Dusun Baru Tapan
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Nagari Simpang Gunung Tapan
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Nagari Kampung Tengah Tapan
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Hutan TNKS

Topografis Nagari Kubu Tapan

No	Bentangan Wilayah	Ya/Tidak	Ha
1	Nagari Dataran Rendah	Ya	2,00
2	Nagari berbukit – bukit	Ya	2,50
3	Nagari Dataran tinggi / Pergunungan	Tidak	-
4	Nagari lereng Gunung	Tidak	-
5	Nagari Tepi Pantai / Pesisir	Tidak	-
6	Nagari Kawasan Rawa	Ya	8,50
7	Nagari Kawasan Gambut	Tidak	-
8	Nagari Aliran Sungai	Tidak	-
9	Nagari Bantaran Sungai	Tidak	-

Orbitasi Nagari Kubu Tapan

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 12 meter
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 18 menit
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 143 km
- Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten 3 jam
- Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kabupaten lancar

- Jarak ke Ibu Kota Propinsi 221 km
- Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Propinsi sekitar 5 jam

2. Gambaran Umum Kondisi Demografis Nagari

Jumlah Penduduk Nagari Kubu Tapan

No	Kampung	Jml KK	JML Jiwa	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pondok Lamo	154	369	243
2	Bukit Lengkuas	185	391	367
	J u m l a h	339	760	610

Jenis Pekerjaan

Nagari Kubu Tapan merupakan Nagari Perkebunan dan pertanian, maka sebagian besar Penduduk dengan Pencaharain sebagai Petani dengan perhitungan persentase sebagai berikut :

No	Kampung	Jenis Pekerjaan				
		Tani	Dagang	Buruh Tani	Tukang	PNS/ABRI
1	Pondok Lamo	21 %	16 %	50 %	8 %	5 %
2	Bukit Lengkuas	20 %	13 %	45 %	6 %	3 %
	J u m l a h	41 %	29 %	95 %	12 %	8 %

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan

Nagari tentang keadaan Ekonomi Nagari Kubu Tapan wilayahnya terletak disebelah Selatan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan lahan sangat luas terutama lahan tidur dimana penduduknya sebagian besar sebagai petani (Pertanian dan Perkebunan)

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Dilihat segi beraktifitas, masyarakat / petani mempunyai semangat juang yang sangat Tinggi dan percaya diri mempersiapkan hari esok yang lebih baik dari sekarang demi masa depan yang lebih cemerlang. Sebagai Pemerintah Nagari tentu tidak luput memberikan motivasi dan semangat bagaimana memanfaatkan lahan – lahan kosong / lahan tidur yang bisa di garap sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan baik dan semoga dapat mewujudkan program Pemerintah dalam mengetas Kemiskinan sehingga masyarakat makmur dan sejahtera.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

A. VISI DAN MISI NAGARI KUBU TAPAN

Rumusan Visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi ke depan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan ciri – ciri khas atau unik masyarakat ke depan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi campaign program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat nagari. Dan hasil penggalian Visi dan Misi.

1.Visi

Visi Nagari Kubu Tapan

"terwujudnya nagari kubu tapan sebagai nagari bersih, mandiri dalam pembangunan disegala bidang dan mensejahterakan masyarakat pada tamanan adat dan agama"

2.Misi

Misi untuk mencapai Nagari Kubu Tapan terdiri dari :

1. Mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang mandiri yaitu pemerintahan yang mampu menggali dan memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).
2. Melaksanakan pembangunan secara Bersih, Transparan, adil dan menyeluruh baik Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Sosial, Adat dan Agama yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Berupaya Memberantas penyakit Masyarakat yang ada di Nagari Kubu Tapan seperti Narkoba, kenakalan Remaja dan lain sebagainya.
4. Berperan aktif untuk memajukan kegiatan Remaja Masjid.
5. Memperkuat Adat dan Agama dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat.
6. Mendorong serta meningkatkan kegiatan pemuda baik di bidang Olah Raga maupun dalam pembangunan Sosial Nagari.
7. Menertibkan Peraturan tentang ternak yang berkeliaran di Jalan Raya.

3. Kebijakan Pembangunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Pembangunan Nagari Kubu Tapan baik fisik maupun mental mengutamakan kepentingan masyarakat banyak bukan kelompok atau golongan yang sesuai dengan visi dan misi Nagari, yang mewujudkan masyarakat berpegang teguh kepada adat dan agama sebagai panutan hidup, kemudian mengembangkan budaya nagari, mencerdaskan anak nagari, meningkatkan taraf hidup masyarakat, hidup bersih dan damai serta menciptakan pelayanan pemerintah nagari yang prima.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN NAGARI (SESUAI RPJM) PEMERINTAH NAGARI

Perumusan isu-isu strategi pembangunan Nagari didasarkan pada kebutuhan mendesak tetapi juga perlu dilihat dari unsur strategi baik aspek pemanfaatan, keberlanjutan, juga berkaitan dengan kecenderungan trend pembangunan Nagari kedepan yang dikaitkan dengan pembangunan tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan manusia secara keseluruhan.

Kesadaran masyarakat dalam merumuskan isu - isu strategis pembangunan ternyata telah menjadi bagian proses pemberdayaan masyarakat untuk melihat sistem pembangunan baik peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi masyarakat.

Penyusunan isu - isu strategis pembangunan Nagari merupakan hasil dari perumusan isu - isu strategis pembangunan Nagari yang akan dirumuskan dalam kerangka besar Program kerja Nagari. Perumusan ini juga menjadi bagian dalam penyusunan kebutuhan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek. Rumusan ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi rencana kerja dan skala prioritas pembangunan Nagari baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Perumusan aspek praktis perencanaan pembangunan Nagari (Musrenbang) Nagari Kubu Tapan :

- a. Rekapitulasi rencana pembangunan Nagari dan sumber - sumber pembiayaan.
- b. Rekapitulasi usulan dari pendanaan APB Nagari, APBD, APBN
- c. Rencana Kerja Tindak lanjut

C. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Prioritas Program dan Kegiatan Nagari Kubu Tapan sesuai RPJM sebagaimana terlampir

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2020

A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari Tahun 2020

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Nagari, Bantuan Pemerintah kabupaten (APBN), Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Pendapatan Nagari Lainnya yang sah

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
4.	Pendapatan Nagari			
4.1	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer			
4.2.1	Dana Desa	1.327.684.400,00	1.274.134.135,07	(53.550.264,93)
4.2.2	Bagi hasil pajak dan retribusi	838.500.000,00 23.274.200,00	827.693.000,00 19.664.035,07	(10.807.000,00) (3.610.164,93)
4.2.3	Alokasi Dana Desa	465.910.200,00	426.777.100,00	(39.133.100,00)
4.3	Pendapatan Lain-Lain			
4.3.6	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.7	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00
Jumlah Pendapatan Desa		1.328.684.400,00	1.275.134.135,07	(53.550.264,93)
Surplus/ (Defisit)		(18.084.655,81)	(18.084.655,81)	0,00
6.	Pembiayaan Desa			
6.1.	Penerima Pembiayaan	18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
Jumlah Pembiayaan/Silpa		(18.084.655,81)	(18.084.655,81)	0,00
Silpa/silpa Tahun Berjalan		(18.084.655,81)	(18.084.655,81)	(38.409.606,88)

B. PENGELOLAAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN TAHUN 2020

- 1. Target dan Realisasi Belanja**
- 2. Permasalahan dan Penyelesaian**

A dan B permasalahan dan penyelesaiannya

Dilihat dari segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan yang bisa digunakan untuk tahun 2020 ini hanya 4 (empat) bidang jenis belanja seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana rincian laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang terlampir.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN

A. Urusan Hak Asal – Usul Pemerintahan Nagari (Program Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian)

Program Kegiatan

Sesuai kesepakatan seluruh unsur di Nagari Tapan dibawah kepemimpinan Wali Nagari Tapan MUKHTAR IS,SE Proses pemekaran Nagari membuahkan hasil. Yang mana rancangan peraturan Nagari tentang pemekaran Pemerintah Nagari Tapan yang diajukan Pejabat Wali Nagari Tapan disetujui oleh Dewan Perwakilan Nagari Tapan pada tanggal 25 Mei 2007 yang selanjutnya 28 Mei 2007 dikirim pada Bupati Pesisir Selatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan no.tahun 2009 tentang pembentukan Pembentukan Pemerintah Nagari Tapan.

Pelaksanaan pelantikan Pj Wali Nagari Masing-masing Pemerintahan Nagari yang dimekarkan pada tanggal 10 Oktober 2011. Terwujudlah penantian yang panjang untuk pemekaran Nagari Tapan. dan dua kecamatan yaitu kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana Nagari yang terdiri di kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 10 Nagari yaitu Nagari Kubu Tapan, Nagari Talang Koto Pulau Tapan, Nagari Binjai Tapan, Nagari Sungai Pinang Tapan, Nagari Kampung Tengah Tapan, Nagari Simpang Gunung Tapan, Nagari Tebing Tinggi Tapan, Nagari Talang Balarik Tapan, Nagari Limau Purut tapan, Nagari Sungai Gambir Sako Tapan.

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Nagari, peran adat, syari'ah dan undang – undang sangat penting artinya.Dalam pengambilan keputusan dikedepankan musyawarah dan mufakat dalam pelayanan public tetap berjenjang naik bertangga turun. Dan sekarang Nagari Kubu Tapan dipimpin oleh SYAFRIADI AHMAD sebagai Wali Nagari Defenitif, untuk memajukan Nagari Kubu Tapan kedepannya didukung / bekerjasama dengan semua unsur yang ada di Nagari.

B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Kabupaten (Program dan Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian)

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.tahun 2009 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tapan menjadi 8 (Delapan) Nagari yakni: Nagari Ampang Tulak Tapan, Nagari Pasar Tapan, Nagari Talang Koto Pulau Tapan, Nagari Binjai Tapan, Nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Nagari Batang Arah Tapan, Nagari Tapan dan Nagari Kubu Tapan. menjadi 20 Nagari dengan bertambahnya 12 Nagari lagi, 20 Nagari tersebut lalu dibagi menjadi 2 Kecamatan, 10 Nagari untuk Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan 10 Nagari lagi untuk Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Masing – masing Nagari Pemekaran dan Nagari Induk disediakan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun 2012 untuk administrasi Pemerintahan Nagari, selanjutnya dari tahun 2015 disediakan Dana

Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Agar peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi masyarakat lebih baik kedepannya.

Permasalahan dan Penyelesaian A dan B

Dari rangkaian kerja yang relative sedikit Nagari Pemekaran melakukan kegiatan di Nagari apa adanya. Solusinya masing - masing Nagari Pemekaran mengalokasikan dalam APBNag tahun 2020 untuk menutupi kekurangan yang ada di tiap - tiap Nagari pemekaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima (Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten)

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.2 tahun 2007 tentang pokok - pokok Pemerintah Nagari.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.9 tahun 2008 tentang 'pokok – Pokok pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.1 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2011
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2011
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap nagari diKabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tugas – tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) terdiri dari Pemerintah Pusat / Propinsi dan Kabupaten yang di distribusikan ke Nagari berjalan dengan baik.

3. Satuan Pelaksana Kegiatan

Terdiri dari Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan Kecamatan / Musfika Kecamatan serta unsur – unsur yang ada dalam Nagari.

4. Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan yang diterima

1. Pendistribusian Raskin

Sesuai tujuannya beras ini diperuntukan bagi keluarga miskin selama tahun 2020 Alokasinya 6 bulan tahun 2020, titik distribusi Nagari Kubu Tapan. Dalam Pendistribusian dilapangan masih ditemui ketidaktetapan sasaran karena masih banyak masyarakat yang mampu menerima Raskin. Namun melalui monitoring dan evaluasi hal ini diminimalisir sehingga diharapkan Subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat dapat dinikmati oleh Keluarga miskin.

2. Program keluarga harapan

Program ini diluncurkan agar rumah tangga sangat miskin memiliki Askes Pendidikan dan Kesehatan. Program ini lebih ditekankan kepada Penyiapan Sumber Daya Manusia yang hasilnya dapat dilihat 5 – 10 tahun kedepan.

3. Program Jamkesmas dan Jamkesda

Program ini diluncurkan untuk menyediakan akses bagi keluarga miskin dengan Cakupan Jamkesmas bisa berobat sampai ke Pusat sedangkan Jamkesda hanya Dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sampai ke Propinsi. Disamping dukungan program ini, Program berobat gratis di Puskesmas sangat membantu masyarakat terutama Masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan.

5. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

Di Nagari Kubu Tapan Pada program PLBM tahun 2020 Nagari Kubu Tapan melaksanakan beberapa bidang pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

5. Sumber dan jumlah Anggaran

Terdiri dari Pendapatan Asli Nagari, APBD dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi / Pusat dan dana Lain – lain yang sah sesuai dengan kebutuhan.

6. Pemmasalahan dan Penyelesaian

Disamping serangkaian kegiatan / program tersebut diatas, Pemerintah Nagari juga memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Nagari, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pada tahun 2020 ini terdapat lonjakan alokasi dana pembantuan di Nagari Kubu Tapan yang diharapkan dapat memacu percepatan pembangunan terutama dalam Pembukaan Jalan Baru dan pembuatan Drainase yang sangat dibutuhkan demi kelancaran ases perekonomian masyarakat Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Kerjasama Antar Nagari (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian

Pemerintahan Nagari Kubu Tapan pada tahun 2020 kerjasama antar Nagari berjalan dengan baik, tidak terjadi konflik baik adat maupun syara' semoga ditahun yang akan datang lebih ditingkatkan, semoga tercipta suatu Nagari yang Indah, damai tentram dan sejahtera sesuai dengan harapan kita semua Amin.

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan dan Penyelesaian

Pada tahun 2020 perantau Nagari Kubu Tapan dan Masyarakat, perhatiannya sangat tinggi tentang kemajuan Nagari Kubu Tapan dalam bidang pembangunan demi kelancaran akses perekonomian masyarakat dan memberikan suatu arahan dan masukan untuk kemajuan Nagari Kubu Tapan.

C. Batas Nagari (Kebijakan dan Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan Dan Penyelesaian)

Mempelajari dan memperhatikan setahun dari Pemerintahan Nagari Kubu Tapan masalah batas Nagari sampai saat ini tidak terjadi masalah. Sampai saat ini Nagari Kubu Tapan tidak terjadi konflik batas dengan Nagari – Nagari Tetangga.

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi dan Penanggulangan.

Di Nagari Kubu Tapan pada tahun 2020 tidak ada terjadi bencana.

Status bencana

Tidak Ada

E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Gangguan yang terjadi

Di Nagari Kubu Tapan pada Tahun 2020 tidak ada terjadi gangguan.

Satuan pelaksana kegiatan

Tidak Ada

Data Perangkat Pemerintahan Nagari terdiri dari : Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kaur Tata usaha dan umu, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Staf Nagari, Staf Bamus dan Kepala Kampung, dengan data - data sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	PENDIDIKAN
1	SYAFRIADI AHMAD	Wali Nagari	Kp.Bukit Lengkuas	SLTA
2	ZENDRIADI PUTRA,S.H	Sekretaris Nagari	Kp.Bukit Lengkuas	S1
3	YOLA PUTRI DELI	Kaur Keuangan	Kp.Pondok Lamo	SLTA
4	DESRI HIDAYATI	Kasi Pemerintahan	Kp.Pondok Lamo	SLTA
5	SUSILAWATIL	Kasi Pelayanan & kesejahteraan	Kp.Pondok Lamo	SLTA
6	IIT SOFRITA OKNILA	Kaur perencanaan & pengelolaan keuangan	Kp.Pondok Lamo	SLTA
7	RADLIS	Kaur Tata usaha dan umum	Kp.Bukit Lengkuas	SLTA
8	JELMI HIDAYATI	Staf Nagari	Kp.Pondok Lamo	SLTA
9	YUNDA WAHYUNIA.Md	Staf Bamus	Kp.Bukit Lengkuas	D3
10	SUKRI MAYADI	Ka.Kamp.Pondok Lamo	Kp.Pondok Lamo	SLTA
11	HERMANSYAH	Ka.Kamp.Bukit Lengkuas	Kp.Bukit Lengkuas	SLTA

Sumber dan Jumlah Anggaran

Terdiri dari ADD, DD dan bagi hasil pajak PBH, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi / Pusat yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan

Penanggulangan dan Kendalanya

Sebagai makhluk berfikir tentu tidak terlepas dari keterbatasan - keterbatasan baik moril maupun materil, hal ini dapat dilakukan / distasi dengan bekerjasama / bantuan dari pihak lain demi terselenggaranya ketentraman dan ketertiban.

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dari berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan di Nagari baik yang sifatnya formal maupun non formal tentu tidak terlepas dari pihak keamanan.Pihak keamanan sangat berperan dalam penanggulangan kegiatan - kegiatan di Nagari.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pembinaan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan tahun 2020 berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat Nagari Kubu Tapan. Secara bertahap diharapkan kita mampu membawa Nagari Kubu Tapan kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Wali Nagari.

Kami menghimbau seluruh lembaga-lembaga yang ada di Nagari, mari kita saling bahu membahu / bekerjasama untuk mewujudkan Nagari Kubu Tapan yang Indah, bersih, Tenram, damai dan sejahtera. Kita upayakan tahun ini lebih baik dari pada tahun kemaren dan tahun depan lebih baik dari pada tahun ini.

B. Saran – saran

Untuk mendukung percepatan pembangunan Nagari Kubu Tapan, diperlukan / mohon dukungan signifikan dari Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Pusat.

Dalam penulisan laporan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan - kekurangan baik tata bahasa, sistematika dan kalimat yang tidak pada tempatnya, maka melalui laporan ini kami mohon maaf. Mudah - mudahan hal ini dapat kami jadikan pelajaran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kami dalam membangun Nagari Kubu Tapan. Sebagai ungkapan akhir kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya program dan kegiatan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan tahun 2020 ini, semoga amal baik kita semua diterima oleh Allah SWT Amin.

Kubu Tapan, 26 Maret 2021

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135 KubuTapan. KodePos. 25673
Email: kubutapan437@gmail.com Web: Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

Berita Acara Musyawarah

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, kami yang bertanda tangan seperti pada daftar hadir terlampir adalah BAMUS NAGARI, Pemerintah Nagari telah mengadakan Musyawarah guna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari Kubu Tapan Tahun 2020.

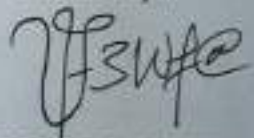
Hasil LKPJ Wali Nagari tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran Berita Acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Pemimpin Rapat


ZENDRIADI PUTRA

Notulis Rapat


IIT SOFRITA OKNILA

DAFTAR HADIR
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Hari, Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021
Pukul : 14.00 WIB S/D Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Kubu Tapan
Acara : Musyawarah Pembahasan LKPJ

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda tangan	
1	SYAFRIADI AHMAD	L	Wali Nagari	Kubu Tapan	1	2
2	SYAMSUL	L	Bamus	Kubu		
3	IPIL	L	WK. Bamus	B. LENGKAS	3	4
4	Zendriadi Putra	L	Setrag	Kubu Tapan		
5	Afruddini	L	Aq. Bamus	P. Lamo	5	6
6	Ikhamdi kumal	L	Bamus	P. Lamo		
7	DAMASMERI	P	B. KANDUANG		7	8
8	IH safrita dinda	P	Kaur	Pondok Lamo		
9	YUNDA WATYUNI	P	Staf Bamus	B. Lengkas	9	10
10	SUSILAWATI L	P	KASIKESPA	B. LENGKAS		
11	JELMI HIDAYATI	P	STAF NAGARI	P. Lamo	11	12
12	YOLIA PUTRI DELI	P	Kaur	P. Lamo		
13	Deski Hidayat	P	KASI PEM	P. Lamo	13	14
14	HERMANISYAH	L	K. KAMPUNG	B. LENGKAS		
15	RADLIS	L	Kaur	Kubu	15	16
16	Sukri mayadi	L	K. kampung	Pondok Lamo		
17	SILVIA Martha	P	PLD	Staf. Pemuda	17	18
18						

Kubu Tapan, 26 Maret 2021
Wali Nagari Kubu Tapan

SYAFRIADI AHMAD

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH PEMBAHASAN LKPJ

